

Pengaruh Pengawasan Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
Devi Mulia Sari¹, Rizki Ramadhan², Nelly Fauzana³

Program Studi Akuntansi Politeknik Aceh
Jl. Tanggul, Pango Raya-Ulee Kareng, Banda Aceh, Telp : 0852-6067-2378
Email: devimuliasari@politeknikaceh.ac.id¹), rizkiramadhan@politeknikaceh.ac.id²),
nelly@mhs.politeknikaceh.ac.id³)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang berjumlah 42 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sehingga observasi dalam penelitian ini adalah 42 orang responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Kata kunci : *Pengawasan Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja SKPK*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat merupakan bentuk perwujudan kinerja yang baik. Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini terdapat dua kebijakan pada situasi desentralisasi, dimana pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola, dan mengalokasikan dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dituntut adanya aparatur pemerintah daerah yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Pencapaian kinerja yang baik sangat diperlukan dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bertanggungjawab serta dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018, p. 76).

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja adalah pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2015, p. 70). Menurut Zimmerman (2015, p. 250) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu bagian dari sistem pengukuran kinerja. Dengan demikian pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, serta sejalan dengan pelaksanaan APBD pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dan entitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Halim, 2015, p. 42). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan sebagai alat kontrol untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik karena akuntansi keuangan daerah berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2016, p. 159). Menurut Zimmerman (2015, p. 250) pengawasan merupakan suatu bagian dari sistem pengukuran kinerja. Dengan demikian pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai

dengan rencana, serta sejalan dengan pelaksanaan APBD pemerintah daerah.

Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum cukup maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Banda Aceh, sehingga masih ada yang belum sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan sasaran dalam penggunaannya, kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh selama ini serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang belum sistematis dan belum efisien yang berdampak pada kerugian keuangan daerah, kekurangan pengerjaan volume pekerjaan dan kelebihan bayar pada pelaksanaan proyek-proyek daerah, kekurangan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Jasa Konstruksi dan sanksi denda keterlambatan yang belum sepenuhnya dipungut, pelaksanaan administrasi tidak sesuai spesifikasi dan ketentuan. Selanjutnya lemahnya sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Kondisi inilah yang dianggap dapat mengakibatkan penurunan kinerja pemerintah Kota Banda Aceh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
2. Apakah pelaksanaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
3. Apakah pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja

Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja yang merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan. Lembaga Administrasi Negara (LAN dan BPKP, 2017) mengungkapkan kinerja dapat digunakan sebagai prestasi kerja, tampilan hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/ produktivitas/ efektivitas dalam mencapai tujuan baik dari segi manajerial dan ekonomis. Prestasi kinerja organisasi merupakan wajah organisasi dalam menjalankan usahanya, dengan penilaian kinerja maka setiap organisasi mengetahui prestasi keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan amanah yang diterimanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan kinerja organisasi merupakan kebijakan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam dinas atau badan pemerintah tersebut. Rasul mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic scheme*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah

Mardiasmo (2015, p.126) menyatakan bahwasanya untuk melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. LAN (2015) mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Halim (2015, p.57) mengelompokkan kinerja dalam enam indikator, yaitu:

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Proses (*process*) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung

dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

4. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
6. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal Departemen atau Lembaga Negara yang diawasinya. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari Lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif (Baswir, 2016, p.122).

Pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan secara efektif berdampak pada sistem keuangan daerah yang diterapkan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemberian wewenang dan keleluasaan kepada para bawahan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat dari pihak pimpinan. Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari

lingkungan internal organisasi pemerintah. (Mardiasmo, 2015, p. 71).

Indikator Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam arti lain bahwa sistem akuntansi keuangan daerah harus memungkinkan terselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Halim, 2015, p.33). Menurut Halim (2015, P. 31) terdapat lima indikator dalam menentukan sistem pengawasan atau pengendalian intern berjalan efektif atau meliputi: (1) adanya pemisahan tugas (*separation of duty*); (2) sistem wewenang dan prosedur yang baik; (3). praktik-praktik yang sehat; (4) pegawai yang cakap, dan; (5) pemimpin yang memiliki komitmen terhadap sistem pengendalian. Oleh sebab itu, suatu organisasi dapat dikatakan baik pengawasan atau pengendalian internnya jika menerapkan kelima indikator tersebut (Bastian, 2015, p. 206).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem keuangan daerah yang digunakan di era reformasi saat ini harus tetap mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tata buku mampu menghasilkan informasi sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku di era reformasi. Perubahan dari tata buku menuju akuntansi dalam manajemen keuangan daerah merupakan sesuatu yang perlu direvisi. Mardiasmo (2018, p. 336) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pencatatan, pengumpulan data, penggolongan, penafsiran, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer yang dilaksanakan sesuai

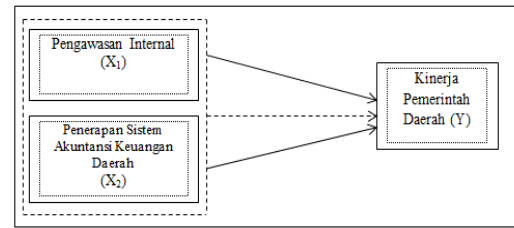
dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.

Indikator Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terdapat dua indikator yang menggambarkan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yaitu (1) kemudahan terhadap pencatatan/penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan (2) manfaat terhadap pengguna sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan (Halim 2015:49). Sistem akuntansi diperlukan untuk menyediakan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern dan pihak intern pemerintah daerah antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Investor, kreditur, donator, analis ekonomi dan pemerhati daerah, pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut (Mardiasmo 2018, p. 337). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2006) menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dijelaskan skema kerangka konseptual penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Edit Penulis (2023)

Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Ha1: Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
- Ha2 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
- Ha3 : Pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Teknik Pengumpulan Data Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk nomor angka. Berdasarkan Sugiyono (2017,p.14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan menjadi metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data memakai instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode penelitian kausal komperatif. Menurut Paramita dan Rizal (2019) bahwa penelitian kausal komparatif merupakan penyelidikan realitas yang sistematis dimana ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi berasal dari variabel bebas sudah terjadi. Atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Menurut Paramita dan Rizal (2019 : 14) Penelitian Kausal Komparatif adalah penelitian yang mencari tahu tentang hubungan sebab - dampak. Metode penelitian ini sangat erat kaitannya dengan penelitian hubungan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam membahas permasalahan ini, penulis melakukan serangkaian pengumpulan data melalui :

1. Wawancara
Wawancara merupakan komunikasi langsung tatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai dan pihak-pihak yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini (Arikunto, 2018, p.124).
2. Kuisisioner
Merupakan pengumpulan data melalui susunan pertanyaan yang mengarah pada tema yang di bahas, kemudian kuisisioner ini dibagikan kepada seluruh responden yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2017, p.120).
3. Kepustakaan
Untuk menyusun landasan teoritis dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang diperoleh dari perpustakaan (Umar, 2013, p.108).

Peralatan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan peralatan analisis data yaitu regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda berguna untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2017, p. 89). Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dituliskan menggunakan rumus :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- X_1 = Pengawasan Intern
- X_2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah
- β_1, β_2 = Koefesien regresi X_1 dan X_2
- e = Error

HASIL DAN PEMAHASAN

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan minimal 2 variabel independen. Dalam penelitian ini diperoleh dua variabel independen yaitu variabel pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kerja.

Tabel 1
Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,108	1,328		2,341	0,024		
Pengawasan Internal	0,716	0,078	0,726	9,164	0,000	0,448	2,231
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,331	0,097	0,269	3,396	0,002	0,448	2,231

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : edit penulis 2023

Berdasarkan Tabel 1 maka persamaan regresi linier berganda yang memperlihatkan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebagai fungsi dari pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

kerja, dapat diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$Y = 3,108 + 0,716 X_1 + 0,331 X_2 + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan regresi diatas, maka dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar sebesar 3,108 artinya jika pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dianggap konstan, maka besarnya kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh adalah sebesar 3,108 pada satuan skala likert.
2. Koefisien regresi pengawasan internal (X_1) sebesar 0,716 artinya bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pada variabel pengawasan internal, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar nilai koefisien regresinya yaitu 71,6% pada taraf signifikansi 0,000 atau probabilitas sig. berada dibawah 0,05 dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan pengawasan internal yang diterapkan para pejabat Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka akan semakin meningkat pula kinerja pemerintah daerah kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh .
3. Koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) sebesar 0,331 artinya bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar nilai koefisien regresinya yaitu 33,1% pada taraf signifikansi 0,002 atau probabilitas sig. berada

dibawah 0,05 dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh akan semakin meningkat pula kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

2) Uji t (Parsial)

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linier berganda maka dapat dilihat hipotesis yang diuji yaitu uji secara parsial (uji t) dalam penelitian ini adalah:

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,164 > 3,220$) maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
2. $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,396 > 3,220$) maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Hasil koefisien pengawasan internal (X_1) sebesar 0,716, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel pengawasan internal, maka secara relatif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar 71,6%, maka semakin tinggi pengawasan internal, maka akan semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukmawa dan Lia mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan intern dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal mengenai Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, pengawasan berpengaruh terhadap kinerja unit satuan pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Hasil koefisien regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) sebesar 0,331, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kerja, maka secara relatif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar 33,1%, dengan demikian semakin tinggi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Djiloy (2019) tentang Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigia. Selanjutnya penelitian

yang dilakukan oleh Tuasikal mengenai Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan pemerintah daerah.

3) Uji F (Simultan)

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linier berganda maka dapat dilihat hipotesis yang diuji yaitu uji secara simultan (Uji F) dalam penelitian ini adalah:

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($158,086 > 2,018$), maka hipotesis H_{o3} ditolak dan hipotesis H_{a3} diterima, artinya variabel pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Untuk menguji hipotesis secara simultan, maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	231,133	2	115,566	158,086	0,000 ^b
	Residual	28,510	39	0,731		
	Total	259,643	41			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Internal

Sumber: Pengolahan Peneliti

Pengaruh Pengawasan internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linier berganda maka dapat dilihat hipotesis yang diuji yaitu uji secara simultan (Uji F) dimana nilai $F_{hitung} >$

F_{tabel} ($12,581 > 3,209$) artinya variabel pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Hal ini berarti bahwa pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara nyata dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmawa dan Lia mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat artinya pelaksanaan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi daerah yang diterapkan akan lebih baik. Secara parsial pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusmalizar tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan dan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila

analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square. R Square dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,844 ^a	0,790	0,885	0,855

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Internal
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Pengolahan peneliti

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa besarnya *R Square* adalah sebesar 0,790. Hal ini berarti 79,0% variasi kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh 2 (dua) variabel independen yaitu pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah kerja. Sedangkan sisanya 12,0%, artinya kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar dari penelitian ini seperti partisipasi penyusunan anggaran, kompetensi, akuntabilitas, integritas dan lain-lain.

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Hasil koefisien pengawasan internal (X_1) sebesar 0,716, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel pengawasan internal, maka secara relatif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar 71,6%, maka semakin tinggi pengawasan internal, maka akan semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Hasil koefisien regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) sebesar 0,331, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kerja, maka secara relatif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebesar 33,1%, dengan demikian semakin tinggi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Pengaruh Pengawasan internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linier berganda maka dapat dilihat hipotesis yang diuji yaitu uji secara simultan (Uji F) dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12,581 > 3,209$) artinya variabel pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Hal ini berarti bahwa pengawasan internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara nyata dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil atas Pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini sebanyak 42 responden. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package For Social Science* (SPSS) 24, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
3. Pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Baswir, Revrison. 2015. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Djiloy, Novita Lerly (2019) Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *e Jurnal Katalogis*. Volume 4 Nomor 6, Juni 2016 hlm 70-82, ISSN: 2302-2019.

- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2019. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah; Seri Bunga Ranpai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2015. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1 :1-17.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. *Tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun. 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahmi, Febri dan Asni Sovia (2017) Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 13 Volume I Tahun 2017
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Suwardjono. 2015. *Akuntansi Pengantar: Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta. BPFE.
- Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*.
- Yusmalizar (2015) Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, No 3.
- Zimmerman, Jerold. 2015. *Accounting for Decision Making and Control, Third Edision*. McGraw-Hill Higher Companies.